

Tahun Anggaran : 2023  
Program :  
Output/K/SK :  
Akun :

## KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Mahkamah Konstitusi RI  
Jumlah Uang : **Rp 15.000.000**  
Terbilang : **Lima belas juta rupiah**  
Untuk Pembayaran : Bantuan biaya riset penyusunan Tesis  
Nama : Rizkisyabana Yulistyaputri  
Jurusan : Magister Ilmu Hukum  
Kampus : Universitas Indonesia

Terhitung : Rp 15.000.000 = Rp 15.000.000  
PPH Ps 21 5% = Rp 750.000  
Jumlah bersih diterima = **Rp 14.250.000**

Jakarta, September 2023  
Yang Menerima

**Rp 15.000.000**

**Rizkisyabana Yulistyaputri**  
NIP. 19930218 201801 2 001

Setuju dibayar  
Pejabat Pembuat Komitmen II  
Penanggung Jawab Kegiatan

Lunas dibayar Tgl September 2023

Bendahara Pengeluaran MKRI

Sri Handayani  
NIP. 19710620 200604 2 001

Yuni Nurhayati  
NIP. 19770531 199903 2 001

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan baik  
Pejabat yang bertanggungjawab

Andi Hakim  
NIP. 19860708 201012 1 001



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

## NOTA DINAS Nomor 5338/2200/KP.02.00/08/2023

Kepada Yth. : Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi  
Dari : Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi  
Perihal : Permohonan Persetujuan Pemberian Biaya Riset  
Tanggal : 29 Agustus 2023

Dengan hormat, berkenaan dengan Tugas Belajar yang dilaksanakan oleh Pegawai a.n. Rizkisyabana Yulisitiaputri pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan pada SK Sekjen Nomor 118 Tahun 2021 tentang Penunjukan PNS untuk mengikuti Tugas Belajar Program Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Sdri. Rizkisyabana Yulistia Putri telah menyampaikan laporan perkembangan Studi pada 14 Agustus 2023;
2. Yang bersangkutan menyampaikan telah dinyatakan **Lulus** sesuai yang tercantum pada Surat Keterangan Lulus Sementara Nomor 234/UN2.F5.D/PDP.00.07.01/2023 pada 02 Agustus 2023 dan *softcopy* Tesis yang disetujui oleh Dewan Penguji sebagaimana terlampir;
3. Berdasarkan Persekjen Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengembangan Kompetensi melalui Jalur Pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Sdri. Rizkisyabana Yulistia Putri berhak diberikan biaya riset sebesar Rp 15.000.000,-;
4. Dengan demikian, mempertimbangkan hal tersebut di atas, kami mohon persetujuan Bapak Sekjen mengenai pemberian biaya riset kepada Sdri. Rizkisyabana Yulistia Putri.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan arahan Bapak Sekjen lebih lanjut, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro SDM dan Organisasi,  
**Sri Handayani**



Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi  
Sri Handayani - NIP:197106202006042001

Digital Signature  
mk-1658195550230829030310

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177

Email: Office@mkri.id



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

[www.mkri.id](http://www.mkri.id)

**KEPUTUSAN  
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 118 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENUNJUKAN SDR. RIZKISYABANA YULISTYAPUTRI, S.H.  
NIP. 19930218 201801 2 001 UNTUK MENGIKUTI TUGAS BELAJAR  
PROGRAM RINTISAN GELAR S2 ILMU HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA**

**SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, sikap dan kepribadian pegawai, perlu menugaskan Sdr. Rizkisyabana Yulistyaputri, S.H. NIP. 19930218 201801 2 001, Pangkat Penata Muda (III/a), Jabatan Peneliti Ahli Pertama, untuk mengikuti Tugas Belajar melalui Program Rintisan Gelar S2 Ilmu Hukum Universitas Indonesia;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang Penunjukan Sdr. Rizkisyabana Yulistyaputri, S.H. NIP. 19930218 201801 2 001 untuk Mengikuti Tugas Belajar Program Rintisan Gelar S2 Ilmu Hukum Universitas Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 39 Tahun 2020 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai negeri Sipil di



Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PENUNJUKAN SDR. RIZKISYABANA YULISTYAPUTRI, S.H. NIP. 19930218 201801 2 001 UNTUK MENGIKUTI TUGAS BELAJAR PROGRAM RINTISAN GELAR S2 ILMU HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA.**

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Mei 2021 s.d. 31 Desember 2023 menunjuk Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagai tersebut di bawah ini, untuk mengikuti Tugas Belajar Program Rintisan Gelar S2 Ilmu Hukum Universitas Indonesia:

Nama : Rizkisyabana Yulistyaputri, S.H.  
NIP : 19930218 201801 2 001  
Tempat, Tanggal Lahir : Magelang, 18 Februari 1993  
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda (III/a)  
Jabatan : Peneliti Ahli Pertama  
Kelas Jabatan : 8  
Unit Kerja : Pusat Penelitian dan Pengkajian  
Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan  
Diberikan Tunjangan Jabatan : Sesuai dengan peraturan  
dan Tunjangan Kinerja perundang-undangan

KEDUA : **Kewajiban**

1. Melaksanakan kewajiban bekerja di kantor dan mengutamakan tugas kedinasan;
2. Melaporkan kemajuan belajar secara berkala **setiap semester** kepada Sekretaris Jenderal melalui Biro SDM dan Organisasi dengan melampirkan fotokopi daftar nilai sementara;
3. Menyelesaikan dengan baik dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
4. Melaporkan secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal setelah menyelesaikan tugas belajar program magister dimaksud;
5. Menyerahkan ijazah dan transkrip nilai asli kepada Sekretaris Jenderal;
6. Setelah menyelesaikan tugas belajar wajib bekerja kepada Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan 2 (dua) kali masa belajar;
7. Menjaga kehormatan dan nama baik Mahkamah Konstitusi;
8. Mematuhi segala ketentuan yang berlaku sebagai Pegawai Negeri Sipil.

KEDUA : **Hak**

1. Memperoleh gaji dan hak keuangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Masa kerja selama tugas belajar dihitung penuh;



3. Mendapat kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Biaya yang berkaitan dengan tugas belajar Program Rintisan Gelar S2 Ilmu Hukum Universitas Indonesia diberikan sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.

**KETIGA** : Pelanggaran terhadap ketentuan ini, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I;
5. Kepala Bagian Keuangan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 April 2021  
**SEKRETARIS JENDERAL,**  
**M. GUNTUR HAMZAH**



Sekretaris Jenderal  
M. Guntur Hamzah - NIP. 19650108 199002 1 001  
*Digital Signature*  
mk-1478815653210429100435

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 15/PUU-XII/2014 TERHADAP PROSES PENYELESAIAN  
SENGKETA KONSUMEN DI BADAN PENYELESAIAN  
SENGKETA KONSUMEN (BPSK)**

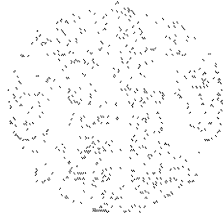
**TESIS**

**RIZKISYABANA YULISTYAPUTRI**

**NPM. 2106667702**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM  
JAKARTA**

**2023**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 15/PUU-XII/2014 TERHADAP PROSES PENYELESAIAN  
SENGKETA KONSUMEN DI BADAN PENYELESAIAN  
SENGKETA KONSUMEN (BPSK)**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister**

**RIZKISYABANA YULISTYAPUTRI**

**NPM. 2106667702**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM  
JAKARTA**

**JULI, 2023**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

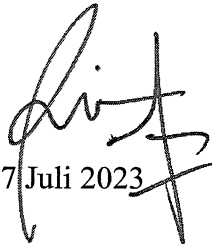
Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Rizkisyabana Yulistyaputri

NPM : 2106667702

Tanda Tangan :

Tanggal : 27 Juli 2023





## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : Rizkisyabana Yulistyaputri  
NPM : 2106667702  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Tesis : Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi  
Nomor 15/PUU-XII/2015 Terhadap Proses  
Penyelesaian Sengketa Konsumen di Badan  
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

## DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Aad Rusyad Nurdin, S.H., M.Kn.

Pembimbing : Dr. Ratih Lestarini, S.H., M.H.

Pembimbing : Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.H.

Penguji : Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo, S.H., M.Si.



(  
(  
(  
(

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 25 Juli 2023

**LEMBAR DISPOSISI**  
**Sekretaris Jenderal**

A.	Nomor Indeks :	Tanggal Disposisi : 29/08/2023
	Nomor Surat : 3669/KP.02.00/08/2023	Tanggal Surat : 14/08/2023
B.	DITERUSKAN KEPADA	ISI DISPOSISI
	, Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	<input checked="" type="checkbox"/> ACC utk ditindaklanjuti sesuai ketentuan, prosedur, dan AUPB.
	SIFAT : <input checked="" type="checkbox"/> Biasa	
C.	CATATAN LAIN:	



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Jakarta, 14 Agustus 2023

**Kepada Yth.**

**Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi  
di Jakarta**

Dengan hormat, berdasarkan Pasal 12 Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Kompetensi Melalui Jalur Pendidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi bahwa PNS Tugas Belajar berkewajiban melaporkan secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan Tugas Belajar. Bersama ini saya menyampaikan bahwa saya telah selesai menyelesaikan Tugas Belajar saya di Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, dengan bukti Surat Keterangan Lulus (SKL) sebagaimana terlampir.

Demikian laporan ini saya sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Bapak, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

**Rizkisyabana Yulistyaputri**

Tembusan:

1. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi;
2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan.



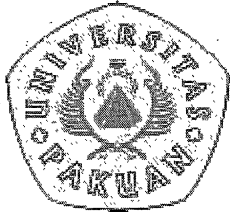
Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda  
Rizkisyabana Yulistyaputri - NIP:199302182018012001

*Digital Signature*  
mk-576422913230814035440

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177

Email: Office@mkri.id



Yayasan Pakuan Siliwangi  
Universitas Pakuan  
Sekolah Pascasarjana

*Konjuran, Integritas, Kreativitas, Kualitas, Harmoni*  
Jln. Pakuan PO BOX 452 Bogor Telp./Fax (0251) 8320123  
E-mail: pasca@pasca-unpak.ac.id Web: www.pasca-unpak.ac.id



**SURAT KETERANGAN LULUS**

No. 1017/SPs/Unpak/VII/2023

Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan menerangkan bahwa :

Nama	: Angga Putri Gardina
Tempat/Tanggal lahir	: Sumenep, 2 Desember 1994
NPM	: 072121019
Program Studi	: Administrasi Pendidikan
Jenjang Pendidikan	: S-2
Tanggal Ujian	: 15 Juni 2023
Tanggal Lulus	: 15 Juni 2023

telah memenuhi segala persyaratan akademis pada Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan sehingga dinyatakan lulus, dan kepadanya diberikan gelar :

***Magister Pendidikan (M.Pd.)***

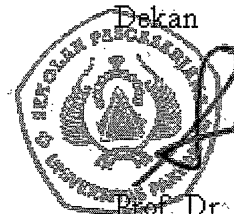
dengan segala hak dan kewajibannya yang melekat pada gelar tersebut.

Surat keterangan kelulusan sementara ini dikeluarkan dalam rangka menunggu penerbitan ijazah yang sedang dalam proses penyelesaian.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Bogor, 26 Juli 2023

Dekan



Prof. Dr. Ing. H. Soewarto Hardhienata



**UNIVERSITAS PAKUAN**

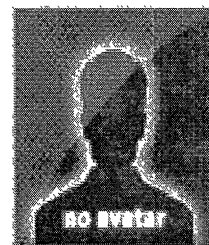
JL. PAKUAN PO. BOX 452 BOGOR JAWA BARAT

Telp : 0251-8312206

Email : rektorat@unpak.ac.id Website : http://www.unpak.ac.id

**TRANSKRIP NILAI**

Nama Mahasiswa	:	ANGGA PUTRI GARDINA
NPM	:	072121019
Tempat, Tanggal Lahir	:	SUMENEP,02 DESEMBER 1994
Fakultas	:	PASCASARJANA
Program Studi	:	S2 ADMINISTRASI PENDIDIKAN
Tanggal Kelulusan	:	
Nomor Ijazah	:	123
Tahun Terdaftar	:	2021/2022



NO	KODE MK	JENIS KURIKULUM	NAMA MATA KULIAH	BOBOT SKS	NILAI		SKS X ANGKA
					ANGKA	HURUF	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
1	SPS82011	INTI	FILSAFAT ILMU	2	4.00	A	8.00
2	MNP8101	INTI	TEORI ADMINISTRASI DAN SIM PENDIDIKAN	3	4.00	A	12.00
3	MNP8102	INTI	PENELITIAN ADMINISTRASI/MANAJEMEN PENDIDIKAN	3	4.00	A	12.00
4	MNP8104	INTI	KEPEMIMPINAN PERUBAHAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN	3	4.00	A	12.00
5	MNP8103	INTI	SUPERVISI DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN	3	4.00	A	12.00
6	MNP8105	INTI	EVALUASI KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PROYEK PENDIDIKAN	3	4.00	A	12.00
7	MNP8201	INTI	PSIKOLOGI DAN SOSIOLOGI PENDIDIKAN	3	4.00	A	12.00
8	MNP8202	INTI	PERILAKU ORGANISASI DAN PERENCANAAN STRATEGIK PEND	3	4.00	A	12.00
9	SPS8202	INTI	STATISTIK TERAPAN	3	3.70	A-	11.10
10	MNP8106	INTI	PENGEMBANGAN SDM DAN INOVASI MANAJEMEN SEKOLAH/DIK	3	4.00	A	12.00
11	SPS8203	INTI	DESAIN PENELITIAN	2	4.00	A	8.00
12	SPS8204	INTI	TESIS (8 SKS)	8	4.00	A	32.00
JUMLAH				39			155.10
INDEKS PRESTASI KOMULATIF				: 3.98			
JUDUL STUDI KASUS			Evaluasi Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Guru Di Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi (Evaluasi Program Countenance Stake Model)				

**Keterangan :**

3.76 - 4.00 = Dengan Pujian (Cum Laude)

3.51 - 3.75 = Sangat Memuaskan

3.00 - 3.50 = Memuaskan

1.00 - 2.99 = Cukup Memuaskan

BOGOR, 11 JULI 2023  
KETUA PRODI ADMINISTRASI PENDIDIKAN

Dr. RAIS Hidayat, M.Pd.  
NIDN.0426067204



Surat Keterangan Lulus Sementara

234 /UN2.F5.D/PDP.00.07.01.2023

Dekan Fakultas Hukum, Universitas Indonesia menerangkan bahwa:

Nama : Rizkisyabana Yulistyaputri  
Nomor Pokok Mahasiswa : 2106667702  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenjang : Magister  
Fakultas : Hukum

telah memenuhi persyaratan akademik dan administrasi sehingga dinyatakan lulus Magister, dari program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

Surat Keterangan Lulus Sementara ini berlaku selama ijazah belum dikeluarkan. Surat Keterangan Lulus Sementara ini hanya berlaku sampai dengan 30 November 2023.

02 Agustus 2023  
Dekan Fakultas Hukum



*Mulian*  
Dr. Parulian P. Aritonang, S.H., LL.M., MPP  
NIP. 197611112008121003